BerAKHLAK

bangga melayani bangsa

TAHUN 2024

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI NTT

LEMBAR KOREKSI LKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : BIRO Perekonomian & AP

KOREKTOR :

1. KELENGKAPAN DOKUMEN LKIP

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1.	Daftar Isi	✓	
2.	Kata Pengantar	✓	
3.	Iktisar Eksekutif	✓	
4.	Lembar Verifikasi Level 1	✓	

2. SISTEMATIKA PENULISAN LKIP

A. BAB I PENDAHULUAN

Apakah BAB I telah memuat tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi serta dasar hukum dan sistematika?

YA ☐ TIDAK ☐

Jika Tidak, sebutkan kekurangannya..

....

....

B. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Apakah pada BAB II berisikan penjabaran berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahunan? ☐ YA ☐ TIDAK

Jika Tidak, sebutkan kekurangannya → perbaiki Visi Misi, sesuai RPD

C. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Apakah pada Bab III memuat Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran?

  ☐ YA ☐ TIDAK
- Apakah pada Bab III menyajikan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi? YA ☐ TIDAK ☐
- Apakah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
  - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
  - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
  - Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
  - Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)
- Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

☐ YA ☐ TIDAK

Jika Tidak, sebutkan kekurangannya……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

D. BAB IV PENUTUP

Apakah pada Bab IV diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya? YA ☐ TIDAK ☐

Jika Tidak, sebutkan kekurangannya……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

E. LAMPIRAN (opsional)

Apakah LKIP memuat LAMPIRAN berupa dokumen lainnya yang dianggap perlu?

☐ YA ☐ TIDAK

CATATAN PERBAIKAN

- perbaiki narasi VMV & misi sesuai RPD.
- perbaiki narasi bab 3 tiap capaian kinerja agar membuat tabel penjelasan capaian indikator serta substansi analisis/narasi sesuai poin C pada lembar koreksi LKIP PD tiap tahun [illegible]

Kupang, 14 - 2 2025

[signature]

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN SETDA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Reviewer	Catatan/Koreksi
1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	1. Perbaiki penulisan, font,kerapihan dan konsistensi huruf 2. Verifikasi data capaian dari masing-masing bagian dan perhitungan persentase capaiannya
2.	Plt Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	-

Kupang, 14 Februari 2025

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT,

Drs. Alexander B. Koroh,MPM
Pembina Tingkat 1
NIP 19700427 199003 1 005

PARAF HIRARKI	
Kepala Bagian Tata Usaha	
Penelaah Teknis Kebijakan	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyelenggaraan-Nya, sehingga seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun anggaran 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, dan sukses.

Berkenaan dengan itu, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun 2024. Dengan adanya LKIP ini diharapkan dapat diperoleh umpan balik yang bermanfaat bagi optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi biro.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu berbagai kritik dan usul saran dari semua pihak demi optimalnya pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT dan penyempurnaan laporan ini, kami sampaikan terima kasih.

Kupang, 14 Februari 2025
Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi NTT,

Drs. Alexander B. Koroh, MPM.
Pembina TK .I
NIP 19700427 199003 1 005

PARAF HIRARKI	
Kepala Bagian Tata Usaha	
Penelaah Teknis Kebijakan	

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024

BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN SETDA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Reviewer	Catatan/Koreksi
1.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	1. Perbaiki penulisan, font,kerapihan dan konsistensi huruf 2. Verifikasi data capaian dari masing-masing bagian dan perhitungan persentase capaiannya
2.	Plt Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	-

Kupang, 14 Februari 2025

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi NTT,

Drs. Alexander B. Koroh,MPM
Pembina Tingkat 1
NIP 19700427 199003 1 005

PARAF HIRARKI	
Kepala Bagian Tata Usaha	
Penelaah Teknis Kebijakan	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyelenggaraan-Nya, sehingga seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun anggaran 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, dan sukses.

Berkenaan dengan itu, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun 2024. Dengan adanya LKIP ini diharapkan dapat diperoleh umpan balik yang bermanfaat bagi optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi biro.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu berbagai kritik dan usul saran dari semua pihak demi optimalnya pelayanan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT dan penyempurnaan laporan ini, kami sampaikan terima kasih.

Kupang, 14 Februari 2025
Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi NTT,

Drs. Alexander B. Koroh, MPM.
Pembina TK .I
NIP 19700427 199003 1 005

PARAF HIRARKI	
Kepala Bagian Tata Usaha	
Penelaah Teknis Kebijakan	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah, wajib menyelenggarakan kepemerintahan yang baik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomoor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mendapat alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar **Rp. 1.360.215.040.-** mengalami Pengurangan anggaran pada perubahan pertama **Rp. 1.799.976** dan Mengalami Penambahan Anggaran pada Perubahan ke dua sebesar **Rp. 200.000.000.-** dan Total Anggaran akhir **Rp. 1.558.415.064.-**dengan realiasai fisik sebesar **87,57 %.**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2024 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2024 berisi laporan

pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sesuai dengan tupoksi yang diembannya, maka pada tahun 2023 ini Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator kinerjanya masing-masing sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024. Realisasi dari masing-masing indikator dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja : Cakupan kebijakan bidang perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik. Target 100 % realisasi 100%,
2. Indikator Kinerja : Cakupan kebijakan pengelolaan SDA yang terkonsolidasi dengan baik. Target 100 % realisasi 100%,
3. Indikator Kinerja : Prosentase BUMD yang memiliki kinerja baik. Target 100 %, Realisasi 100 % dimana pada tahun 2024 ada 3 (Tiga) BUMD yang berkinerja baik. Dan menghasilkan 3 Dokumen
4. Indikator Kinerja : Efektifitas peningkatan kinerja administrasi Pembangunan dengan target 100 % dan 8 laporan pengendalian administrasi pembangunan yang memenuhi standar akkuntabilitas realisasi 100% dan menghasilkan 13 laporan

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 terpenuhi sesuai dengan harapan.

Memperhatikan perbandingan capaian kinerja antara target indikator kinerja dan realisasi Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur nampak seluruh indikator yang direncanakan berhasil dicapai dengan optimal sesuai target. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan pembinaan dan komitmen kuat dari Kepala Biro, pejabat Fungsional Analis Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Analis Ahli Muda Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan seluruh staf pelaksana dilingkungan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan prinsip efektivitas dan akuntabiltas penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR 2

IKHTISAR EKSEKUTIF 3

DAFTAR ISI 5

BAB 1 Pendahuluan 6

1.1 Latar Belakang 7

1.2 Maksud dan Tujuan 7

1.3 Dasar Landasan 7

1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pem bangunan 9

1.5 Analisis Lingkungan Stratejik 10

1.6 Sistematika Penyajian LKIP 15

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja 16

2.1 Perencanaan Kinerja 16

2.2 Program dan Kegiatan 16

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 17

2.4 Anggaran Belanja Biro Perekonomian dan Admnistrasi Pembangunan 53

BAB III Akuntabilitas Kinerja 41

3.1. Pengukuran Kinerja 41

3.2. Capaian Kinerja Organisasi 42

3.3. Akuntabilitas Keuangan 59

BAB IV Penutup 62

4.1. Kesimpulan 62

4.2. Rekomendasi 63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuanya itu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan stratejik memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis untuk mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Laporan kinerja ini merupakan bagian dari upaya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam rangka penguatan sistema kuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas LKIP.

Salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu pintu dan kemudahan perolehan informasi. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggungjawab, maka untuk lebih memantapkan Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi baikkondisi internal maupun eksternal. Tersusunnya LKIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan:

(1) Meningkatkan kualitas Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;

(2) Meningkatkan komitmen dan kerjasama antara Inspektorat, Bappelitbangda, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Biro Organisasi Setda Provinsi NTT maupun seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga terjalin kerjasama sesuai manajemen kinerja mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja hingga pada evaluasi kinerja; dan

(3) Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, benar dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan LKIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut

1. Maksud :

   Untuk memberikan informasi yang komprehensif berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan Rencana Stratejik (Renstra) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar lebih meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang organisasi yang lebih berdayaguna, berhasil guna, transparan dan bertanggungjawab.

2. Tujuan :

   Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)*.

1.3. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Laporan Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
19. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Penyederhanaa Birokrasi;
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PDA-Unit SKPD) Biro Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 Nomor: 4.01.5.07.0.00.01.0004

1.4 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0102) dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTT, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Untuk Penyederhanaa Birokrasi Pasal 1 poin 16 dan 17, maka susunan struktur organisasi pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terdiri atas:

Organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terdiri dari :

1. Jabatan Stuktural :
    1.1. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
    1.2. Kepala Sub Tata Usaha.
2. Analis Kebijakan Ahli Madya
3. Analis Kebijakan Ahli Muda
4. Pranata Komputer Ahli Pertama
5. Pelaksana

Total jabatan struktural dan fungsional yang terisi pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebanyak 6 (Enam), terdiri dari 2 (dua) jabatan struktural dan 3 (Tiga) jabatan fungsional dan 1 (Satu) Pelaksana sebagai berikut :

- Eselon II : 1 orang
- Eselon IV : 1 orang
- Analis Ahli Madya : 3 orang
- Analis Ahli Muda : 6 orang
- Pranata Komputer Ahli pertama : 4 orang
- Pelaksana : 21 orang

Bagan struktur organisasi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan seperti tersebut di atas merupakan salah satu elemen penting yang memungkinkan beroperasinya seluruh sumber daya aparatur dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

1.5 Analisis Lingkungan Stratejik

Potensi yang dimiliki Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya meliputi dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana dan dukungan keuangan, sebagai berikut :

1.Dukungan SDM

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ruang, kualifikasi pendidikan, jabatan struktural, fungsional dan pelaksana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan per Januari 2024 sebagai berikut :

Data PNS Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024

- **Jumlah Pegawai**

No	Jabatan	Jumlah	Eselon	Ket
1	Kepala Biro	1		Terisi
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	IV-A	Terisi
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya	3	-	Terisi
4	AnalisisKebijakan Ahli Muda	6	-	Terisi
5	Pranata Komputer Ahli Pratama	4	-	Terisi
6	Pelaksana	21	-	Terisi
Jumlah		36 orang		

- **Berdasarkan Gender**
  - Laki-Laki : 15 orang
  - Perempuan : 21 orang
- **Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	-
2	S2	8 Orang
3	S1	21 Orang
4	SLTA	7 Orang
Jumlah		**36 Orang**

- **Berdasarkan Golongan**

	Pangkat	Golongan	Jumlah ASN
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-

2	Pembina Tk I	IV/b	3 orang
3	Pembina	IV/a	3 orang
4	Penata Tk 1	III/d	14 orang
5	Penata	III/c	2 orang
6	Penata Muda Tk 1	III/b	3 orang
7	Penata Muda	III/a	7 orang
8	Pengatur Tk I	II/d	-
9	Pengatur	II/c	3 orang
10	Pengatur Muda Tk I	II/b	1 orang
11	Pengatur Muda	II/a	-
Jumlah			**36 Orang**

2. Dukungan sarana dan prasarana kantor

Kondisi dan jenis sarana prasarana juga berpengaruh terhadap operasional kegiatan organisasi, meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan sarana transportasi. Secara umum keadaan sarana dan prasarana pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat dilihat pada buku inventarisasi barang yang didalamnya terdapat kartu inventarisasi barang dan rekapitulasi aset tetap

Secara umum dapat di sampaikan sebagai berikut :

NO	SPESIFIKASI BARANG		SATUAN	TAHUN	KONDISI (B/KB/R/RB)	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK/ TYPE						
1	Laptop	Toshiba	Buah	2013	B	1	7.391.000	7.391.000
		Toshiba	Buah	2013	B	2	9.000.000	18.000.000
		Acer	Buah	2013	B	1	4.400.000	4.400.000
			Buah	2018	B	4	9.750.000	39.000.000

NO	SPESIFIKASI BARANG		SATUAN	TAHUN	KONDISI (B/KB/R/RB)	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK/ TYPE						
			Buah	2019	B	1	7.500.000	7.500.000
		Asus	Buah	2022	B	2	8.855.000	17.710.000
2	Komputer PC	Samsung	Buah	2013	B	1	7.000.000	7.000.000
		Acer	Buah	2013	B	5	4.400.000	22.000.000
			Buah	2014	B	3	6.000.000	18.000.000
			Buah	2014	B	1	8.000.000	8.000.000
			Buah	2015	B	2	7.500.000	15.000.000
			Buah	2015	B	4	8.500.000	34.000.000
			Buah	2017	B	1	7.500.000	7.500.000
		Hp all in one	Buah	2018	B	1	10.000.000	10.000.000
		Asus	Buah	2017	B	2	7.500.000	15.000.000
		Lenovo	Buah	2018	B	1	7.250.000	7.250.000
			Buah	2020	B	6	8.000.000	48.000.000
3	Printer	Canon	Buah	2013	B	2	1.000.000	2.000.000
			Buah	2014	B	4	1.000.000	4.000.000
		Scan Pixma	Buah	2015	B	1	2.500.000	2.500.000
		Dot Matrix	Buah	2015	B	2	8.500.000	17.000.000
		Canon	Buah	2016	B	1	2.500.000	2.500.000
		Scan Pixma	Buah	2016	B	1	2.500.000	2.500.000
		Epson L380	Buah	2017	B	1	3.500.000	3.500.000
			Buah	2018	B	4	3.400.000	13.600.000
		Epson	Buah	2020	B	6	4.000.000	24.000.000

NO	SPESIFIKASI BARANG		SATUAN	TAHUN	KONDISI (B/KB/R/RB)	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)
	NAMA/ JENIS BARANG	MEREK/ TYPE						
		L310						
4	UPS	Ersis	Buah	2013	R	1	880.000	880.000
		ICA	Buah	2018	B	3	1.700.000	5.100.000
5	Notebook	Toshiba	Buah	2013	B	2	3.250.000	6.500.000
6	Infocus	Proyektor NEC	Buah	2013	B	1	5.000.000	5.000.000
		Proyektor Banq	Buah	2014	B	1	8.000.000	8.000.000
		Proyektor Glite	Buah	2016	B	1	2.500.000	2.500.000
		LCD Proyektor Epson EB-S400	Buah	2017	B	1	6.000.000	6.000.000
		TipeSegiempat	Buah	2018	B	1	850.000	850.000
7	Sound System						25.000.000	25.000.000
8	Filling Kabinet		Buah	2015	B	1	7.500.000	7.500.000
				2018	B	2	2.366.700	4.733.400
9	Kendaraan	Rush DH 936 AW	Unit (KIBOLOG)	2014	B	1	228.685.000	228.685.000
		Rush DH 53 WA	Unit	2015	B	1	250.100.000	250.100.000

2. Dukungan Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam Pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan anggaran di setiap SKPD. Pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mendapat alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar **Rp. 1.360.215.040.-** mengalami Pengurangan anggaran pada perubahan pertama **Rp. 1.799.976** dan Mengalami Penambahan Anggaran pada Perubahan ke dua sebesar **Rp. 200.000.000.-** dan Total Anggaran akhir **Rp. 1.558.415.064.-**dengan realiasai fisik sebesar **87,57 %.**

1.6 Sistematika Penyajian LKIP

Sistematika penyajian LKIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan alasan/manfaat disusunnya LKIP, struktur dan tupoksi organisasi sampai pada unit kerja yang terendah, potensi internal dalam ruang lingkup organisasi serta sistematika dari penyusunan LKIP.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Dalam Bab ini diuraikan mengenai visi dan misi organisasi, program/kegiatan yang dilaksanakan, pengungkapan perjanjian kinerja/penetapan kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini dipaparkan mengenai capaian indikator kinerja utama setiap sasaran stratejik, evaluasi dan akuntabilitas kinerja setiap sasaran strategis, evaluasi dan akuntabilitas kinerja setiap sasaran strategis serta uraian akuntabilitas anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan LKIP disertai dengan harapan bahwa laporan ini mampu menjadi pedoman perbaikan pelaksanaan tugas Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada masa yang akan datang.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja dan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang termuat dalam RENSTRA tahun 2024 s.d 2026 di dasarkan atas visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu :

1. Visi

   NTT Maju,Sehat,Cerdas,Sejahtera, dan Berkelanjutan

2. Misi
   1. Memastikan Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU);
   2. Memperluas pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial yang lebih insklusif, terjangkau,dan mudah diakses (SEHAT);
   3. Menghadirkan Pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif, dan tepat sasaran (CERDAS);
   4. Mewujudkan Kesejahteraan social, kesetaraan akses,serta kualitas hidup yang berkeadilan dan mandani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA); dan
   5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang insklusif ((BERKELANJUTAN).
3. Tugas pokok Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yaitu : membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kebijakan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta Administrasi Pembangunan.

2.2. Program dan Kegiatan

Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran. Dengana danya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana tersebut diatas,

pada tahun anggaran 2024 telah disusun program dan kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai berikut :

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
  - ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - ✓ Kegiatan Penyediaan Jassa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- **Program Perekonomian dan Pembangunan**
  - ✓ Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
  - ✓ Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam ;
  - ✓ Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.
- **Program Administrasi Pembangunan:**
  - ✓ Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
  - ✓ Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunana Daerah

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dikelola.

Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur ;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ; dan
5. Sebagai dasar pemberi reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan RENSTRA Tahun 2024 s.d 2026 yang menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

1. Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah dibidang perekonomian dan Sumber Daya Alam.

2. Terlaksananya koordinasi pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik.
3. Terwujudnya tata kelola monitoring dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Alexander B. Koroh, MPM**

Jabatan : **Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Kosmas D. Lana**

Jabatan : **Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 20 Februari 2024

Pihak Kedua,

Kosmas D. Lana

Pihak Pertama,

Drs. Alexander B. Koroh, MPM

PARAF HIERARKI	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	
Plh Kabag RB dan Akuntabilitas	

PARAF HIERARKI	
Analis Ahli Madya	
Kasubag Tata Usaha	
Analis Kebijakan Ahli Muda	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya efektivitas koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam.	Persentase Cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (kebijakan ekonomi makro-mikro SDA)	100%	100%	Cakupan kebijakan substansi Ekonomi Makro - Mikro, SDA yg diselesaikan / Cakupan kebijakan substansi Ekonomi Makro – Mikro, SDA yg direncanakan x 100
2.	Meningkatnya pembinaan, monitoring, evaluasi tatakelola BUMD dan BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penerimaan PAD berupa Dividen.	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	75%	100 %	Cakupan Pembinaan,koordinasi Fasilitasi BUMD,BLUD yg diselesaikan / Cakupan Pembinaan Koordinasi,Fasilitasi BUMD dan BLUD yg direncanakan x100

3.	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi administrasi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah dalam rangka terciptanya penataan administasi pembangunan yang tertib	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi Pembangunan	100%	100%	Realisasi Fisik dan Keuangan ----------x 100 Target Realisasi Fisik dan Keuangan yg direncanakan

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi		Keterangan
1.	**APBD**			
	a) Belanja(Program)	**Rp**	**1.360.215.040,-**	**Realisasi minimal 85%**
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	385.279.616,-	Realisasi minimal 90 %
	2. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	759.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	3. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp.	215.935.424,-	Realisasi minimal 85%
	b) **Pendapatan**	Rp.	-	-
	Jumlah Belanja	Rp	**1.360.215.040,-**	**Realisasi minimal 85%-**
2.	**APBN**			
	a) Program Dekonsentrasi	**Rp.**	**230.451.000.-**	**Realisasi minimal 90%-**
	1. Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	230.451.000.-	Realisasi minimal 90%
	b) Program Tugas Pembantuan	**Rp.**	-	-
	Jumlah Dekonsentrasi	**Rp.**	**230.451.000,-**	**Realisasi minimal 90%-**

C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan took daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling Lambat Tanggal 12 Februari 2024;

F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;

G. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);

H. Rata-rata realisasi Kinjerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;

I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:

   1. TL temuan Tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;

   2. TL temuan dibawah Tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%.

J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;

K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;

L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);

N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, 20 Februari 2024

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Drs. Alexander B. Koroh, MPM

PARAF HIERARKI	
Analis Ahli Madya	
Kasubag Tata Usaha	
Analis Kebijakan Ahli Muda	

Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Kosmas D. Lana

PARAF HIERARKI	
Asisten 3 Sekda	
Kepala Biro Organisasi	
Plh Kabag.Akuntabilitas Kinerja	

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Alexander B. Koroh, MPM**

Jabatan : **Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Kosmas D. Lana**

Jabatan : **Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 1 November 2024

Pihak Kedua,

Kosmas D. Lana

Pihak Pertama,

Drs. Alexander B. Koroh, MPM

PARAF HIERARKI	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Plt.Kepala Biro Organisasi	
Plh. Kabag RB dan Akuntabilitas	

PARAF HIERARKI	
Analis Kebijakan Ahli Madya	
Kasubag Tata Usaha	
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya efektivitas koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam.	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (kebijakan ekonomi makro-mikro)	100%	100%	Jumlah Cakupan kebijakan substansi Ekonomi Makro Mikro yg diselesaikan / Jumlah Cakupan kebijakan substansi Ekonomi Makro Mikro yang terkonsolidasi x 100
		Persentase cakupan kebijakan substansi SDA yang terkonsolidasi dengan baik	100%	100%	Jumlah Cakupan kebijakan substansi SDA terkonsolidasi yg diselesaikan / Jumlah Cakupan kebijakan substansi SDA yang terkonsolidasi x 100
2.	Meningkatnya pembinaan, monitoring, evaluasi tatakelola BUMD dan BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penerimaan PAD berupa Dividen.	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	75%	100 %	Jumlah Cakupan Pembinaan,koordinasi Fasilitasi BUMD,BLUD yg diselesaikan / Jumlah Cakupan Pembinaan Koordinasi,Fasilitasi BUMD dan BLUD yg terkonsolidasi x100

3.	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi administrasi pembangunan dacrah dan pembangunan wilayah dalam rangka terciptanya penataan administasi pembangunan yang tertib	Persentase Cakupan Koordinasi monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Dacrah dan Pembangunan Wilayah yang tertib	100%	100%	Jumlah Cakupan Koordinasi,monev AP Daerah dan AP Wilayah yg diselesaikan / Jumlah Cakupan Koordinasi,monev AP Daerah dan AP Wilayah x 100

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	**APBD**		
	a) Belanja(Program)	**Rp. 1.558.415.064,-**	**Realisasi minimal 85%**
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 385.079.640,-	Realisasi minimal 90 %
	2. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 959.600.000,-	Realisasi minimal 85 %
	3. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 213.735.424,-	Realisasi minimal 85 %
	b) Pendapatan	Rp. -	-
	Jumlah Belanja (APBD)	**Rp. 1.558.415.064,-**	Realisasi minimal 90 %
2.	**APBN**		
	a) Program Dekonsentrasi		
	1. Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	**Rp. 230.451.000.-**	Realisasi minimal 90%
	b) Program Tugas Pembantuan		
	Jumlah Dana Dekonsentrasi	**Rp. 230.451.000.-**	Realisasi minimal 90%

C. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing(E-Katalog dan Toko Daring) Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;

D. Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;

E. Penyampaian LKSKPD paling lambat tanggal 26 Januari 2024, sedangkan Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 12 Februari 2024;

F. **Penyampaian LHKPN ddan SPT Tahunan paling lambat tanggal 31 Maret 2024;**

G. **Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);**

H. **Rata-rata realisasi Kinjerja Individu dalam SKP minimal predikat BAIK;**

I. **Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut:**

   1. **TL Rekomendasi Tahun 2024 : Administrasi 100%, Keuangan 80%;**
   2. **TL Rekomendasi dibawah tahun 2024: Administrasi100%, Keuangan 80%;**

J. **Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (Lima) Jenis;**

K. **Penciptaan arsip elektronik (Korespondensisurat masuk dan keluar) melalui Aplikasi SRIKANDI minimal 80%;**

L. **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**

M. **Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);**

N. **Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.**

Kupang, 1 November 2024

Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kosmas D. Lana

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Drs. Alexander B. Koroh, MPM

PARAF HIERARKI	
Plt.Asisten Administrasi Umum	
Plt.Kepala Biro Organisasi	
Plh. Kabag RB dan Akuntabilitas	

PARAF HIERARKI	
Analis Kebijakan Ahli Madya	
Kasubag Tata Usaha	
Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	

Tabel .2.2
RENCANA KERJA TAHUNAN
BIRO PEREKNOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2024	OUTCOME	BENEFIT	IMPAC
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya efektivitas koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam.	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (kebijakan ekonomi makro-mikro)	100%	100%	Persentase Cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik meliputi aspek kebijakan Ekonomi Makro, Mikro, dan SDA	Peningkatan Koordinasi kebijakan Perekonomian yang meliputi aspek Makro, Mikro, dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam.
		Persentase cakupan kebijakan substansi SDA yang terkonsolidasi dengan baik	100%	100%			
2	Meningkatnya pembinaan, monitoring, evaluasi tatakelola BUMD dan BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penerimaan PAD berupa Dividen.	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100%	100%	Persentase Cakupan kebijakan Pembinaan ,koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolisdasi dengan baik	Peningkatan Pembinaan Koordinasi pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola serta Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota	Terwujudnya Pembinaan Koordinasi pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola serta Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota

3	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi administrasi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah dalam rangka terciptanya penataan administasi pembangunan yang tertib	Persentase Cakupan Koordinasi monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah yang tertib	100%	100%	Persentase Perangkat Daerah yang tertib Administrasi Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Wilayah	Peningkatan Perangkat Daerah yang tertib Administrasi Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Wilayah	Terwujudnya Perangkat Daerah yang tertib Administrasi Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Wilayah

IKU BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya efektivitas koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam.	Persentase Kebijakan dan Substansi Perekonomian Yang Terkonsolidasi Dengan Baik (Kebijakan Ekonomi Makro, Mikro)	100%
		Persentase Kooridinasi Dan Evaluasi kebijakan SDA Yang Terkonsolidasi Dengan Baik	100%
2.	Meningkatnya pembinaan, monitoring, evaluasi tatakelola BUMD dan BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penerimaan PAD berupa Dividen.	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100%
3.	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi administrasi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah dalam rangka terciptanya penataan administasi pembangunan yang tertib	Persentase perangkat Daearah Tertib Administrasi Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Wilayah	100%

Indikator Kinerja dari setiap sasaran strategis di bagi dalam 2 (dua) Program yang dijelaskan sebagai berikut :

1. **Capaian dari Program Perekonomian dan Pembangunan adalah**: Cakupan implementasi kebijakan bidang perekonomian, Sumber Daya Alam dan BUMD/BLUD.

   Program ini melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, untuk Keluaran, Hasil dan Indikator Kinerja dari masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

   Adapun 3 (tiga) kegiatan yang di laksanakandalam program Perekonomian dan Pembangunan yaitu:

   a. **Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**

Keluaran	:	Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi Perekonomian Makro dan Mikro	
Hasil	:	Terlaksanannya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah Secara Optimal.	
Indikator/ Target	:	1.Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan pengendalian inflasi daerah (Rapat Teknis, High Level Meeting, Rapat Koordinasi Kabupaten, Monev Daerah IHK dan Pengendalian Inflasi Daerah, Sidak Pasar, Rakornas, Konsultasi Ke Jakarta Pengendalian Inflasi) Lokasi Monev : (Rapat Teknis : Kab.TTS) lokasi HLM Kota Kupang, RAKOR lokasi : Kab. Alor dan Kab. Malaka, Monev IHK Lokasi : Kab. Ngada, Kab. Sikka, Kab. Sumba Timur, dan Kab. TTS Monev Pengendalian Inflasi Daerah : Kab. Ende, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Barat	64 Dok 7 Rek
		2.Jumlah Dokumen dan hasil koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM dan optimalisasi penyaluran KUR kegiatan Rakor : Lokasi kota Kupang Lokasi Monev : Kab. Alor, Kab. TTU, dan Kab. Malaka.	2 Dok 1 Rek
		3.Jumlah Dokumen Hasil, evaluasi dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi di NTT Konsultasi ke Jakarta tentang Penyaluran BBM, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM	1Dok

		Monev penyaluran BBM Lokasi : Kab. Alor, Kab. Belu, Kab. Lembata, Kab. Rote Ndao, Kab. Sabu Raijua, Kab. Sikka	

b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Keluaran	:	Pengelolaan Kebijakan dan KoordinasiSumber Daya Alam	
Hasil	:	Terlaksanannya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	
Indikator / Target	:	1. Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi penyusunan Kebijakan Terkait pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) lok. Kota kupang dan Kab. TTS	1 Dok
		2. Jumlah Dokumen Hasil Monotoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SDA (lok. Kab. Kupang, Sumba Barat Daya 1x, Kab Ende, Ngada , Malaka,	1 Dok
		3. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air Lokasi Kab, Kab Malaka, TTS , TTU ,Sumba Barat Daya	1 Dok

c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

Keluaran	:	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
Hasil	:	Terlaksanannya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	
Indikator / Target	:	1. Jumlah Notulen Hasil Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi (1x Rapat Audiens terkait temuan PT. Fobamor bersama dengan BPK RI Menghasilkan 1 Notulen	1 Notulen
		2. Jumlah Dokumen dalam rangka monitoring penerapan SK Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum PERUMDA/PDAM di Kab/Kota Se -Prov NTT Lok Kab Flotim, Kab Sumba Timur, Kab. Sikka Kab.Rote Ndao, Kab.TTS, Kab. Ngada dan Kab. Belu	1 Dok
		3. Jumlah SK Hasil Rapat Sosialisasi Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum	SK Gubernur Dalam proses TTD Pimpinan
		4. Jumlah Dokumen Rapat koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Lokasi :Kab. Manggarai , Kab. Lembata, Kab. Alor	1 dokumen

		5. Penyusunan perda Penyertaan Modal pada PT BPD NTT	Naskah Akademik dan Ranperda Penyertaan Modal
		6. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD (Lokasi, Kab. Lembata Tanggal 29 April 2024, Flores Timur Tanggal 2 Mei 2024, Sumba Tengah Tanggal 3 September 2024, Sumba Barat Daya Tanggal 5 September 2024, Kabupaten Alor Tanggal 14 November 2024)	5 Dok

2. Program Administrasi Pembangunan

Capaian dari Program ini yaitu: Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan

Program ini melaksanakan 1 (satu) kegiatan, untuk Keluaran, Hasil dan Indikator kinerja dari kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Adapun 1 (satu) kegiatan yang di laksanakan dalam program Administrasi Pembangunan yaitu :

a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Keluaran	:	Terlaksananya program Administrasi Pembangunan	
Hasil	:	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	
Indikator / Target	:	1. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Pelakasanaan Pembangunan (APBD) Rapat dilaksanakan 4x dalam setahun dengan Lokasi , Kota Kupang.	4 Dok
		2. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (APBN) Rapat dilaksanakan 2x dalam setahun dengan Lokasi , Kota Kupang	2 Dok
		3. Jumlah Laporan Paket Sebaran Kegiatan APBD	1 Dok
		4. Jumlah Dokumen Hasil monitoring dan pemantauan pelaksanaan Pembangunan daerah di Kab/Kota (APBN) lokasi, Kab. Kupang, Kab. Ngada,Kab. Sikka,Kab. TTS, Kab. TTU,Kab. Belu, Kab. Manggarai (APBD) Jakarta, Kab. Saburaijua, Kab .Nagakeo, Kab. Lembata, Kab. Kupang, Kab TTS Kab. TTU, Kab. Manggarai, Kab. Rote Ndao.	2 Dok
		5. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan wilayah yang dilaksanakan 2x dalam setahun dengan lokasi, Kota kupang dan Kab. TTS. Dan Monev pemantauan pelaksanaan pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah dengan Lokasi Kab. TTS, KAb. Sikka, dan KAb. Sumba Barat Daya, Kab. Belu,Kab. Alor, Kab. TTU	2 Dok
		6. Jumlah Laporan Hasil pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan pelaporan pelaksanaan Pembangunan daerah	13 lap
		7. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaporan	1 lap

		Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dan Wilayah dengan Lokasi Kab. TTS, KAb. TTU, Kab. Belu, Kab. Malaka	

Mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan maka kegiatan untuk mendukung sasaran strategis secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan 1	:	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**
		Untuk mewujudkan pencapaian kegiatan tersebut maka dijabarkan dalam sub kegiatan :
		1. Fasiltasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 2. Fasiltasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
		Besar anggaranyang untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp. 408.000.000,-**
Kegiatan 2	:	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**
		Untuk mewujudkan pencapaian kegiatan tersebut maka dijabarkan dalam sub kegiatan :
		1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.
		Besar anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp109.100.000 ,-**
Kegiatan 3	:	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**
		Untuk mewujudkan pencapaian kegiatan tersebut maka dijabarkan dalam sub kegiatan :
		1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan pendirian BUMD 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan pendirian BLUD
		Besar anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp.442.500.000,-**
Kegiatan 4	:	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**
		Untuk mewujudkan pencapaian kegiatan tersebut maka dijabarkan dalam sub kegiatan :
		1. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2. Pelaporan pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Besar anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp. 213.735.424.-**

2.4. Anggaran Belanja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Dalam Pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 terdapat perubahan anggaran di setiap SKPD. Pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT adalah 3 (tiga) Program dengan 9 (Sembilan) kegiatan.

Komposisi Anggaran Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2024

No	Program/ Kegiatan	DPA Murni	Perubahan	
			Penambahan	Jumlah Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	385.079.640.-		385.079.640.-
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	759.600.000.-	200.000.000	959.600.000.-
3.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	213.735.424	-	187.160.000
	Total	**1.358.415.064**	**200.000.000**	**1.558.415.064**

Komposisi Anggaran Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pagu Akhir (Rp.)
1	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH ADAERAH PROVINSI**	1. Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja PD		49.139.000	-	49.139.000
		2. Administrasi Umum PD		161.568.000	-	161.568.000
		3. Penyedi aan Jasa Penunjang Urusan PD		100.585.040		100.585.040
		4. Pemeliharaan Barang Milik Daaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		73.787.600.-	-	73.787.600.-
2	**PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	1. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	4. Fasilit asi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan mikro	408.000.000	-	408.000.000
		2.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	5. Koord inasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	69.100.000	-	69.100.000
			6. Sinkro nisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	40.000.000	-	40.000.000
		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	7. Koord inasi sinkronisasi dan evaluasi kegiatan pendirian BUMD	156.000.000	200.000.000	356.000.000
			8. Koord	86.500.000	-	86.500.000

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pagu Akhir (Rp.)
			inasi sinkronisasi dan evaluasi kegiatan pendirian BLUD			
3	**KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daeraah	9. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	99.000.000	-	99.000.000
			10. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	39.660.000	-	39.660.000
			11. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan wilayah	48.500.000	-	48.500.000
		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	26.575.424	-	26.575.424
JUMLAH				**1.258.415.064**	**200.00.000.-**	**1.558.415.064**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi *actuating* sampai pada pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai sistem perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran Kinerja untuk mengukur sasaran.

LKIP Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

3.1 Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, Perekonomian dan Administrasi Pembangunan melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya.

1. Metode Pengukuran Kinerja

Capaian Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

c. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana - (Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\ \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indicator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indicator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- X ≥ 85 % : Sangat Berhasil
- 75 % ≤ X <85 % : Berhasil
- 55 % < X < 75 % : Cukup Berhasil
- X ≤ 55 % : Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran, maka dapat dijelaskan sasaran strategis Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Tahun 2024 sebagai berikut :

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Sasaran Strategis Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tahun 2024 sesuai target keberhasilan yang dapat diuraikan dalam table sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN(%)	KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terlaksanannya koordinasi pembinaan , Monitoring dan Evaluasi Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan SDA	Perlaksanaan Kebijakan Perekonomian Makro dan Mikro	100 %	2 Dok 1 Rek	67 Dok 8 Rek	100%	Terlaksanannya pemantauan dan pengendalian inflasi daerah (Rapat Teknis, High Level Meeting, Rapat Koordinasi Kabupaten, Monev Daerah IHK dan Pengendalian Inflasi Daerah, Sidak Pasar, Rakornas, Konsultasi Ke Jakarta Pengendalian Inflasi) Lokasi Monev : (Rapat Teknis : Kab.TTS) lokasi HLM Kota Kupang, RAKOR lokasi : Kab. Alor dan Kab. Malaka, Monev IHK Lokasi : Kab. Ngada, Kab. Sikka, Kab. Sumba Timur, dan Kab. TTS Monev Pengendalian Inflasi Daerah : Kab. Ende, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Barat

							Terlaksanannya koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM dan optimalisasi penyaluran KUR dengan lokasi Kota Kupang
							Terlaksananya Evaluasi dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi di NTT Konsultasi ke Jakarta tentang Penyaluran BBM, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM dengaan lokasi Kab. Alor ,Kab. Manggarai
		Perlaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	100 %	2Dok	3 Dok	100%	Terlaksananya Fasilitasi penyusunan Kebijakan Terkait pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) lok. Kota kupang dan Kab. TTS
							Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SDA lok. Kab. Kupang, Sumba Barat Daya Kab Ende, Ngada , Malaka,

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)	KEBERHASILAN
1	2	3		5	6	7	8
							Terlaksananya Rapat koordinasi EBT dengan Lokasi di Kab. Kupang Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Air Lokasi Kab, Kab Malaka, TTS , TTU ,Sumba Barat Daya
2	Terlaksananya koordinasi, pembinaan monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentasi Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	100 %	2 Dok	7 Dok 1 Notulen 1 SK Gub 1 Naskah Akademik Dan Ranperda Penyertaan Modal	100 %	Terlaksanannya Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi (1x Rapat Audiens terkait temuan PT. Fobamor bersama dengan BPK RI Menghasilkan 1 Notulen
							Terlaksanannya monitoring penerapan SK Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum PERUMDA/PDAM di Kab/Kota Se -Prov NTT Lok Kab Flotim, Kab Sumba Timur, Kab. Sikka Kab.Rote Ndao, Kab.TTS, Kab. Ngada dan Kab. Belu
		Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100%	2Dok	5 Dok	100%	Terlaksanannya Sosialisasi SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Air Minum Terlaksanannya Penyusunan perda Penyertaan Modal pada PT BPD NTT

							Terlaksanannya Rapat koordinasi, sinkronisasiMonitoring dan Evaluasi Kebijakan pengelolaan BUMD Keuangan dan Aneka Usaha dengan Lokasi : Kab. Maggarai, Kab. Lembata, dan Kb. Alor Terlaksanannya Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BLUD (Lokasi, Kab. Lembata Tanggal 29 April 2024, Flores Timur Tanggal 2 Mei 2024, Sumba Tengah Tanggal 3 September 2024, Sumba Barat Daya Tanggal 5 September 2024, Kabupaten Alor Tanggal 14 November 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN (%)	KEBERHASILAN
1	2	3		5	6	7	8
3	Terwujudnya Tatakelolah Monitoring dan Pelaporan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah dan Wilayah di Provinsi atau Kab/Kota se-NTT	Persentase perangkat Daearah Tertib Administrasi Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Wilayah	100 %	3 Dok	11 Dok	100 %	Terlaksanannya Rapat Evaluasi Pelakasanaan Pembangunan (APBD) Rapat dilaksanakan 4x dalam setahun dengan Lokasi , Kota Kupang. Terlaksanannya Rapat Evaluasi

							Pelaksanaan Pembangunan (APBN) Rapat dilaksanakan 2x dalam setahun dengan Lokasi , Kota Kupang Terlaksanannya Paket Sebaran Kegiatan APBD Terlaksanannya monitoring dan pemantauan pelaksanaan Pembangunan daerah di Kab/Kota (APBN) lokasi, Kab. Kupang, Kab. Ngada,Kab. Sikka,Kab. TTS, Kab. TTU,Kab. Belu, Kab. Manggarai (APBD) Kab.Malaka,Kab. Belu, Kab. Saburaijua, Kab .Nagakeo, Kab. Lembata, Kab. Kupang, Kab TTS Kab. TTU, Kab. Manggarai, Kab. Rote Ndao.

		Pengendalian Administrasi Pembangunan yang memenuhi standar akuntabilitas	100%	1 Lap	14 Lap	100%	Terlaksanannya pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan pelaporan pelaksanaan Pembangunan daerah Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dan Wilayah dengan Lokasi Kab. TTS, KAb. TTU, Kab. Belu, Kab. Malaka

Program-program yang mendukung sasaran ini adalah Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Administrasi Pembangunan. Adapun kegiatan – kegiatan yang mendukung dengan permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan kedua program tersebut adalah sebagai berikut :

- **Program Perekonomian dan Pembangunan dengan kegiatan :**

  a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian.

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
1	1. Jumlah Dokumen hasil Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).	100	100			
	2. Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan UMKM dan	100	100			Sesuai Target

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
	Optimalisasi Penyaluran KUR					
	3. Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, evaluasi dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi di NTT	100	100			Sesuai Target

b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam.

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya MengatasiPermasalahan	
2	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi penyusunan Kebijakan Terkait pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) lok Kota Kupang dan Kab.TTS	100	100			Sesuai Target
	2. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Madu di Kec. Mutis	100	100			Sesuai Target -
	3. Jumlah Dokumen Hasil MonItoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SDA	100	100			Sesuai Target -
	4.Jumlah Dokumen Hasil Rapat Terpadu Upaya Peningkatan Elektrifikasi Daerah	100	100	-	-	Sesuai Target
	5. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Potensi Pengembangan EBT dan Sumber Daya Alam	100	100			Sesuai Target -

c.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
3	1. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi (1 kali) Rapat Evaluasi Pembinaan BUMD Prov menghasilkan 1 Dok	100	100	Karena berakhirnya masa jabatan pengelola BUMD serta memfasilitasi seleksi Direksi PT. Flobamor dan PT. Kawasan Industri Bolok serta Pelantikan Direksi dari ke dua BUMD tersebut dilaksanakan pada Bulan Desember Tahun 2024 .	-	
	2. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	100	100			Sesuai Target
	3. Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pembinaan BUMD Prov NTT (PT.BPD NTT,PT.Jamkrida, PT.Flobamor, dan PT. Kawasan Industri Bolok)	100	100	-	-	Sesuai Target

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
	4. Jumlah SK Hasil Rapat Sosialisasi SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum	1 SK Gubernur	1 SK Gubernur	-	-	Sesuai Target
	5. Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi Penerapan SK Gubernur Tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Perumda /PDAM di Kab/Kota Se-Provinsi NTT	100	100			Sesuai Target -
	6. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan pengelolaan BLUD.	100	100	-	-	Sesuai Target
	7. Jumlah Dokumen Hasil Monev Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri RI Terkait Kebijakan Pendirian BLUD di Prov.NTT	1 Dok	1 Dok			Sesuai Target

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
	8. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD.	100	100			Sesuai Target
	9. Jumlah Dokumen Hasil Monev Dalam Rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri RI terkait kebijakan pendirian BLUD di Prov NTT	100	100	-	-	Sesuai Target

- **Program Administrasi dan Pembangunan**

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya MengatasiPermasalahan	
4	1. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (APBD)	100	100	-	-	Sesuai Target
	2. Jumlah Dokumen Hasil Paket Sebaran Kegiatan APBD	100	100	-	-	Sesuai Target
	3. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (APBN)	100	100	-	-	Sesuai Target
	2 Jumlah Dokumen Hasil monitoring dan pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah	100	100			Sesuai Target
	3 Jumlah Dokumen Hasil rapat koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	100	100	-	-	Sesuai Target
	6. Jumlah Dokumen Hasil pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan pelaporan pelaksanaan Pembangunan daerah dari 33 PD	100	100	-	-	Sesuai Target
	7. Jumlah Dokumen Hasil dan evaluasi pelaporan pelaksanaan Pembangunan	100	100			Sesuai Target

No.	Indikator Kinerja Utama	2024				Ket.
		Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya MengatasiPermasalahan	
	daerah dan wilayah					

Cakupan kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Cakupan kegiatan Tahun 2024

Kegiatan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya efektivitas koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam.	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (kebijakan ekonomi makro-mikro)	100	100
		Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (kebijakan SDA)	100	100
	Meningkatnya pembinaan, monitoring, evaluasi tatakelola BUMD dan BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penerimaan PAD berupa Dividen.	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100	100
		Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100	100
	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi administrasi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah dalam rangka terciptanya penataan administasi pembangunan yang tertib	Persentase Cakupan Koordinasi monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah yang tertib	100	100
		Persentase Cakupan Koordinasi monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Wilayah yang tertib	100	100

Capaian Sasaran 1 **Terlaksanannya koordinasi pembinaan ,Monitoring dan Evaluasi Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan SDA** tahun 2024 mencapai 100%,

Capaian Pelaksanaan kegiatan Kebijakan Perekonomian Makro dan MikroTahun 2024 adalah 100%, mencapai target yang ditetapkan Dengan menghasilkan : 67 Dokumen, 8 Rekomendasi,dan Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan SDA menghasilkan 3 Dokumen . Hasil pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Ruang Lingkup

1. Kepala Dinas Perangkat Daerah yang tergabung dalam TPID
2. Forkopinda Provinsi NTT
3. Kepala BI
4. Kepala BPS
5. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog NTT
6. Manajer Pelindo III Pelabuhan Tenau kupang
7. Manajer Angkasa Pura II Eltari kupang
8. Pasar Kasih Naikoten
9. Pasar Oeba
10. Pasar Oebobo
11. Gudang Bulong
12. Gudang Distributor Komoditas Pangan
13. Masyarakat
14. Konsumen
15. Pertamina
16. Kabupaten/ Kota
17. Pemda TTS
18. Bank NTT
19. Bank BRI
20. Anggota Kelompok sentra Madu Mutis
21. Perangkat Daerah Provinsi Undana
22. Anggota Pokja HHBK Provinsi NTT

b) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk:

1. Terlaksananya HLM TPID, untuk 30 orang, Lokasi Kota Kupang,
2. Terlaksanannya RATEK TPID, untuk 30 Orang Lokasi KAb. TTS
3. Terlaksanannya Kegiatan RAKOR di Lokasi Kab. Alor, dan Kab. Malaka
4. Terlaksanannya Kegiatan Monev IHK dengana Lokasi : Kab. Ngada, Kab. Sikka, Kab. Sumba Timur,
5. Sidak Pasar, 2 kali, untuk 30 orang Lokasi Kota Kupang
6. Terlaksananya Monev Kegiatan TPID dengan Lokasi : Kab. Ende, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Barat
7. Terlaksananya Rapat Optimalisasi Penyaluran KUR dan UMI, 1 kali, untuk 60 orang, Lokasi Kota Kupang
8. Rapat Evaluasi Pengendalian Distribusi BBM, 1 kali, untuk 60 orang, Lokasi Kota Kupang, dan
9. Terlaksanannya kegiatan Monev BBM. Dengan Lokasi : Alor dan KAb. Manggarai
10. Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan SDA (lokasi Kab. Sumba Barat Daya ,Kab. Kupang, Kab. Ngada, Kab. Malaka
11. Terlaksanannya Fasilitasi Penyusuanan Kebijakan terkait pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dengan Lokasi Kota kupang dengan Kab. TTS
12. Terlaksannya Monitoring dan Evaluasi potensi pengembangan EBT dan SDA (lokasi Kab.Malaka,Kab. TTS ,Kab. TTU,Kab. Sumba Barat Daya).

Fakto Pendukung dan Penghambat

1. **Faktor Pendukung**
   1. Adanya Koordinasi yang baik dari lintas Sektor dan Dinas Teknis dalam mendukung kegiatan Makro ,Mikro dan SDA
   2. Adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan (Makro, Mikro ,SDA);
   3. Pelaksanaan kegiatan Perekonomian dan Pembangunan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD.
2. **Faktor Penghambat**
   1. Kecenderungan Perangkat daerah lambat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang diminta
   2. Terdapat beberapa kesepakatan bersama yang belum ada tindak lanjutnya

Capaian Persentase jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan pendirian BUMD dan BLUD **Tahun 2024** adalah 100%, mencapai target yang ditetapkan. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup

1. Direktur Utama PT. JAMKRIDA
2. Direktur Utama PT Flobamor
3. Direktur Utama PT Kawasan Industri Bolok
4. Direktur Utama PT BPD NTT (Bank NTT)Direktur Eksekutif PERPAMSI Pusat
5. Pakar Ekonomi Politeknik Negeri Kupang
6. Walikota Kupang
7. Kadis Kesehatan, Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi NTT
8. Direktur BLUD RSUD Prof Dr. W.Z Johanes Kupang provinsi NTT
9. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
10. Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT
11. Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi NTT
12. Kepala BLUD SPAM Provinsi NTT
13. Direktur BLUD RSJ Naimata Kupang

b. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk:

1. Terlaksananya Rapat Evaluasi Kinerja dan Pembinaan BUMD Provinsi (1x Rapat Evaluasi Pembianaan BUMD Provinsi;
2. Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Lok Kab Manggarai, Kab Lembata, Kab.Alor;
3. Terlaksananya pemantauan dan Pembinaan BUMD Provinsi NTT (PT. BPD NTT, PT. Jamkrida, PT.Flobamor, dan PT. Kawasan Industri Bolok);
4. Terlaksananya Rapat sosialisasi SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Bawah Air Minum;
5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penetapan SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Perumda/PDAM di Kab/Kota Se-

Provinsi NTT (Lok. Flotim,Sumba Timur,Sikka, Rote, TTS, Ngada, Belu);

6. Terlaksanannya Penyusunan Ranperda Penyertaan Modal pada PT. BPD NTT

C7. Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan

. Pengelolaan BLUD (Lokasi, Kab. Lembata Tanggal 29 April 2024, Flores Timur Tanggal 2 Mei 2024, Sumba Tengah Tanggal 3 September 2024, Sumba Barat Daya

H Tanggal 5 September 2024, Kabupaten Alor Tanggal 14 November 2024)

a

Hasil Yang Dicapai

kegiatan BUMD dan BLUD yang berkinerja baik sesuai dengan Laporan Akuntabilitas keuangan menghasilkan 4 BUMD yang berkinerja Baik dan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan pendirian BUMD menghasilkan : 2 Dok. 1 Notulen, 1,SK, (SK Gubernur Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Perumda/PDAM di Kab/Kota Se-Provinsi NTT)

1 dan 1 Hasil Akademik dan 1 Ranperda Penyertaan Modal Daerah Pada PT. BPD. NTT

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan pendirian BUMD menghasilkan : 5 Dokumen

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

   a. Adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan Kegiatan BUMD menjadikan BUMD yang berkinerja Baik
   b. Pelaksanaan kegiatan Perekonomian dan Pembangunan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD.

2.Faktor Penghambat

   a. Kurang Efektif dan Efesien dalam pembinaan dan Manajemen pengelolaan BUMD
   b. Belum adanya tenaga professional dalam menganalisis Laporan keuangan dari BUMD
   c. Terdapat beberapa kesepakatan bersama yang belum ada tindak lanjutnya

Capaian Cakupan Persentase Cakupan Koordinasi monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah yang tertib Tahun 2024 adalah 100%, mencapai target yang ditetapkan. Hasil pelaksanaan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup

1. Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT
2. UPT Pusat , Balai -Balai Kementerian yang ada di Provinsi NTT
3. Pemerintah Kabupaten Kota Se -NTT

b. Pelaksanaan Kegiatan

Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan (APBD); Rapat dilaksanakan 4 x dalam setahun lokasi di kota Kupang dan Kab Kupang
2. Paket sebaran kegiatan APBD;
3. Terlaksananya rapat evauasi pelaksanaan pembangunan (APBN);Rapat dilaksanakan 2 x dalam setahun lokasi di kota Kupang dan Kab Kupang
4. Terlaksanannya Monitoring dan Evaluasi kegiatan APBD dan APBN dengan Lokasi APBN : (Kab. Kab. Kupang, Kab. Ngada, Kab. Sikka, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, Kab, Manggarai) , APBD : Kab. Malaka, Kab. Belu, Kab. Saburaijua, Kab. Nagakeo, Kab,. Lembata, Kab.TTS, Kab. TTU, Kab. Manggarai dan Kab. Rote Ndao)
5. Terlaksananya monitoring dan pemantauan pelaksanaan pembangunan daerah di Kab/Kota; (Lokasi Kota Kupang ,Kab. Kupang Kab. Ngada ,kab Sikka, Kab TTS,Kab TTU
6. Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah; yang dilaksanakan 2 Kali dalam setahun dengan Lokasi Kota Kupang, Kab. TTS
7. Terlaksananya pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan pelaporan pelaksanaan daerah;
8. Terlaksananya Monev pelaporan pelaksanaan PD dan wilayah.

Koordinasi monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah yang tertib Tahun 2024 menghasilkan 11 Dokumen dan 14 Laporan.

d. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung
   a. Adanya Koordinasi yang baik dari 33 OPD dalam mendukung kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah

b. Adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan Kegiatan monitoring dan Evaluasi Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah;

c. Pelaksanaan kegiatan Perekonomian dan Pembangunan didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD.

2. Faktor Penghambat

a. Kecenderungan Perangkat daerah lambat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan terkait lapaoran Administrasi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Wilayah yang diminta

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Komposisi anggaran yang dialokasikan dalam DPA-DPPA Tahun Anggaran 2024 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan dan Alokasi anggaran pada setiap kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

NO/ KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			RP	%	RP	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.558.415.064	1.364.773.689	87,57	193.641.375	12,42
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	385.079.640	378.161.319	98,20	6.918.321	1,80
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.139.000	48.010.700	97,70	1.128.300	2,30
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.568.000	161.557.179	99,99	10.821.000	6,70
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.585.040	95.039.120	99,49	5.545.920	5,51
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	73.787.600	73.554.320	99.68	223.280	0,31
06.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	959.600.000	773.715.990	80.63	185.884.010	19.37
06.06.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	408.000.000	332.795.902	81.57	75.204.098	18,43

NO/ KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			RP	%	RP	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
06.06.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	**382.900.000**	**321.336.502**	**83.92**	**61.563.498**	**16,08**
06.06.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	**25.100.000**	**11.459.400**	**45.65**	**13.640.600**	**54.35**
06.06.02	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**109.100.000**	**91.242.480**	**83.63**	**17.857.520**	**16.37**
06.06.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	69.100.000	54.396.940	78.72	14.703.060	21.28
06.06.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi Kebijakan Energi dan Air	40.000.000	36.845.540	92.11	3.154.460	7.89
06.06.03	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**442.500.000**	349.677.608	**79.02**	92.822.392	**20.98**
06.06.03.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengdirian BUMD	356.000.000	279.157.188	78.41	76.842.812	21.59
06.06.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengdirian BLUD	86.500.000	70.520.420	81.53	15.979.580	18.47
08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**213.735.424**	**212.896.380**	**99.61**	**839.044**	**0,39**
08.08.01	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**187.160.000**	**186.664.480**	**99.74**	**495.520**	**0,26**
08.08.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	99.000.000	98.983.240	99.98	16.760	0,01
08.08.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	39.660.000	39.633.800	99.93	26.200	0,06
08.08.01.03	Pengendalian Administrasi	48.500.000	48.047.440	99.07	452.560	0,93

NO/ KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			RP	%	RP	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Pelaksanaan Pembangunan Wilayah					
08.08.02	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**26.575.424**	**26.231.900**	**98.71**	**343.542**	**1,29**
08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	26.575.424	26.231.900	98.71	343.542	1,29

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Biro Perekonomian dan Admnistrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan evaluasi sekaligus pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

4.1. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) sasaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan jumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan capaian kinerjanya dikategorikan berhasil baik. Dapat dijelaskan bahwa target yang di berikan dalam RPJMD 2018-2023 dapat di capai sesuai dengan laporan pada Bab 3 (tiga).

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Anggaran yang dialokasikan untuk Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mendapat alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 sebesar **Rp. 1.360.215.040.-** mengalami Pengurangan anggaran pada perubahan pertama **Rp. 1.799.976** dan Mengalami Penambahan Anggaran pada Perubahan ke dua sebesar **Rp. 200.000.000.-** dan Total Anggaran akhir **Rp. 1.558.415.064.-**dengan realiasai fisik sebesar **87,57 %.**

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa kendala / masalah yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Akibat pencairan dana yang terbatas sehingga beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
2. Berdasarkan analisis jabatan jumlah pegawai di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT sebanyak 36 orang. Jumlah pegawai tersebut masih kurang baik dari sisi kualitas maupun kuantitas khususnya dalam jabatan fungsional umum.
3. Pengumpulan data base terkait program dan kegiatan yang telah dilaksanakan masih belum terdokumentasi dengan baik.

a. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT Tahun 2024 maka untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja tahun 2024 disesuaikan berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026.
2. Perlu penambahan jabatan fungsional umum sehingga dapat membantu memperlancar tugas pokok dan fungsi di Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT.
3. Data base dari setiap kegiatan akan di dokumentasikan dengan baik.
4. Capaian hasil secara administratif berupa tersusunnya sejumlah dokumen kebijakan perlu dilengkapi dengan capaian dari pelaksanaan kebijakan ekonomi, pengelolaan SDA, Kinerja BUMD dan BLUD serta AKIP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tahun 2024 dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kupang, 14 Februari 2024
Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi NTT,

Drs. Alexander B. Koroh, MPM.
NIP 19700427 199003 1 005
Pembina Tk.I

PARAF HIRARKI	
Kepala Bagian Tata Usaha	
Penelaah Teknis Kebijakan	